



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 100.3.3.3/012/DKIS TAHUN 2025 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar,

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197801281996121003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN I : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 JULI 2025
NOMOR : 100.3.3.3/012/HK/2025
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 100.3.3.3/012/DKIS TAHUN 2025

Pada hari Rabu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 bertempat di daring zoom meeting telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Hasil Rapat yang bersifat rahasia	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia dan belum final dapat menimbulkan polemik	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan, sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Laporan Keuangan sebelum di audit	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan	Sampai dengan adanya hasil audit yang bersifat final
3	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Konfigurasi database aplikasi, username dan password	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan badan publik	Terjaganya keamanan badan publik	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
4	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar dan Anggota DPRD Kota Denpasar	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi	Menyesuaikan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
5	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen perencanaan pengawasan (Memuat Dokumen perencanaan pengawasan yaitu PKPT, Konsep Temuan, dll)	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk	Mengamankan agar tidak terjadi pengalihan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu Auditee		
6	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen Proses dan Hasil Pengawasan (Memuat dokumen hasil pengawasan seperti LHP, LHA, dll)	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu auditee	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
7	Inspektorat Kota Denpasar	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26;		mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	
8	Inspektorat Kota Denpasar	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 b. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak Terbatas
9	Inspektorat Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data	Tidak Terbatas
10	Inspektorat Kota Denpasar	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (Memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lain-lain)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
11	Inspektorat Kota Denpasar	Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalihan data	Tidak Terbatas
12	BPBD Kota Denpasar	Lokasi Server	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
13	BPBD Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
14	BPBD Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama masih digunakan/berlaku
15	BPBD Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai D	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
16	BPBD Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j			
17	BPBD Kota Denpasar	Rencana Anggaran Kegiatan (RKA)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Bisa terjadi kesalahpahaman karena Perencanaan Pemerintah Daerah masih dalam proses	Melindungi proses rencana kerja pemerintah daerah yang belum ditetapkan dengan Perwali dan APBD yang ditetapkan dengan Perda	Sampai pada proses perencanaan dan sudah menjadi Dokumen Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perwali dan berproses lagi menjadi RAPBD yang selanjutnya menjadi APBD yang ditetapkan dengan Perda
18	BAPENDA Kota Denpasar	Laporan pajak pajak pribadi	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Dibuka apabila : 1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan 2. Permintaan/ atau persetujuan sendiri 3. Permintaan Institusi/ lembaga berwenang
19	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Peraturan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
20	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Keputusan tentang pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Keputusan
21	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. b. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
22	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen transaksi kas masuk bank dan kas keluar di rekening kas daerah	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila : Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara		disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang	
23	BAPENDA Kota Denpasar	Data wajib pajak dan Laporan Penghasilan/omset wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. c. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku 2. Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan
24	BAPENDA Kota Denpasar	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2. Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan. 3. Permintaan wajib pajak itu sendiri
25	BAPENDA Kota Denpasar	Berkas Pelayanan yang diajukan wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan c. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2. Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan. 3. Permintaan wajib pajak itu sendiri

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
26	BAPENDA Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database	a. UU No 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan data	Menjaga keamanan data	Selama masih digunakan/berlaku
27	BAPENDA Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	SIMDA	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Selama masih digunakan	Dapat membahayakan Data Aset Pemerintah berkaitan dengan neraca Pemerintah Kota	Melindungi keamanan data aset pemerintah (Pemeriksaan BPK)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Setelah mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengakibatkan kerancuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Menjaga stabilitas pertanggungjawaban yang akuntabel

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1); d. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;			
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No 24 Th 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan			
31	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
32	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Mengganggu proses penyusunan atau menghambat pengambiln kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
33	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Seluruh data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasi atau didokumentasikan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebaran informasi yang belum akurat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
34	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan keputusan dan menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
35	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
36	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan akan eretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
37	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	<i>User ID dan Password aplikasi</i>	a. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25	Memungkinkan adanya penyalahgunaan ha akses oleh pihak yang	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf b dan j	tidak bertanggungjawab		
38	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
39	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	<i>Bandwith Management</i>	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Melindungi keamanan sistem	Selama masih digunakan/berlaku
40	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arisp oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih digunakan/berlaku
41	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 66 ayat 3h	Mengungkap arsip vital dan keamanan daerah	Melindungi penyalahgunaan arsip vital dan keamanan aset daerah	Selama masih digunakan/berlaku
42	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Rencana MoU (Kerjasama)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf f	Mengganggu atau menghambat proses kkerjasama	Mendukung kkesuksesan kerjasama	Sampai MoU dilaksanakan
43	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Laporan pertanggungjawaban Keungan SKPD	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diauidt oleh tim aduit

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
44	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Rencana Kerja Anggaran Tahunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
45	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b b. UU No. 11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
46	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	a. UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b b. UU No. 11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 tahun 2018 pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
47	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Proses penelitian (data, foto, video)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data, duplikasi atau plagiat serta tersebarnya informasi yang belum akurat dan teruji	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Dibuka sampai dengan laporan penelitian/buku/jurnal diterbitkan
48	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Data Pribadi Responden wawancara penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				serta dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab		
49	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Proses penilaian penjuarian pada Lomba Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah dan Kompetisi Inovasi Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu hak penilaian dan keputusan pada juri	Melindungi hak penilaian dan keputusan pada juri	Dibuka apabila diijinkan oleh panitia (BRIDA Kota Denpasar)
50	Badan Riset Daerah Kota Denpasar	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Mengganggu perlindungan HKI	Melindungi HKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan habis
51	BAPPEDA Kota Denpasar	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Denpasar	a. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 ayat 3 b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun	Memuat data pribadi (<i>by name by address</i>) yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu apabila aksesnya dibuka	Data hanya dapat diakses oleh Pihak Tertentu yang memiliki ijin untuk mengakses data dalam upaya penyusunan perencanaan program kegiatan	Seumur hidup (sepanjang data berlaku)

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional			
52	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi Hak Akses pengguna system informasi data srever	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut	Dapat mengungkapkan data rahasia berupa hak akses pengguna system informasi data server	Menjaga rahasia data hak akses pengguna sistem informasi data sever	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
53	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi pada dokumen forum DK (Data Keluarga) pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi keluarga	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
54	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen cuti sakit pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
55	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
56	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen terkait hasil penilaian kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
57	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi atau dokumen terkait pendidikan formal atau pendidikan non-formal pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal	pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal		
58	BAPPEDA Kota Denpasar	Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan ataupun pelaksanaan kegiatan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
59	BAPPEDA Kota Denpasar	Data pribadi responden survey/penelitian	UU No.14 Tahun 2008 huruf j dan ketentuan lainnya dalam UU Perlindungan Data Pribadi	Seumur hidup (sepanjang data berlaku).	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
60	BKPSDM Kota Denpasar	Proses Tindak Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik	Merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses tindak disiplin. Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang	1. Mengganggu proses bisnis/ proses penjatuhan hukuman tindak disiplin 2. Penyalahgunaan data 3. Efek sosial yang berujung pada justifikasi publik terhadap pns yang melanggar	Proses pengambilan tindak disiplin dapat berjalan dengan lancar dan netral	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)			
61	BKPSDM Kota Denpasar	SK Penjatuhan Tindak Disiplin	Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)	1. Penyalahgunaan data 2. Efek sosial yang berujung pada justifikasi publik terhadap pns yang melanggar	Proses pengambilan tindak disiplin dapat berjalan dengan lancar dan netral	25 tahun
62	BKPSDM Kota Denpasar	SK Perceraian	Alasan privasi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat (terutama anak), Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Adanya potensi dampak negatif dari publisitas terhadap masalah keluarga (private) 2. Sebagai upaya untuk melindungi privasi dan martabat individu yang terlibat dalam proses	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			(Pasal 17) b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	perceraian, dan memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan adil.		
63	BKPSDM Kota Denpasar	SK Penjatuhan Pelanggaran Kode Etik Tertutup	Hanya dapat dibuka untuk pemeriksaan pengadilan dan termasuk kepada rahasia jabatan Dasar hukum: a. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) b. Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 57)	Efek sosial yang berujung pada justifikasi publik terhadap pns yang melanggar	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	
64	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen Hasil Penilaian Kompetensi	Merupakan rahasia personal layaknya “rekam medis” yang digunakan sebagai salah satu	Hasil penilaian termasuk kedalam riwayat pribadi yang	Proses seleksi / promosi ASN berjalan dengan lancar dan netral,	Selama PNS Aktif Bertugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Manajerial dan Sosial Kultural ASN	aspek dalam rencana suksesi pegawai Dasar hukum: Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	tidak dapat dipublikasikan kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan untuk pengembangan diri selanjutnya	Pengembangan diri dan pengembangan karier dapat berjalan sesuai standar yang ada	
65	BKPSDM Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai Berupa: Nomor Telepon, Alamat Rumah, NIK, data keluarga, Tanggal kelahiran, Nomor KK)	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak Bertanggungjawab 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
66	BKPSDM Kota Denpasar	SK Pengangkatan Dalam Jabatan	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
67	BKPSDM Kota Denpasar	Sk Kenaikan Pangkat	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
68	BKPSDM Kota Denpasar	Sk Kenaikan Gaji Berkala Pimpinan	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
69	BKPSDM Kota Denpasar	Sk Pensiun	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	1. Menjaga data pribadi agar tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggungjawab (karena bernilai uang) 2. Merupakan privasi seseorang untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan	Terjaminnya kerahasiaan atas data pribadi seseorang	25 tahun
70	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen Konseling ASN	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Hasil konseling termasuk kedalam riwayat kesehatan yang tidak dapat dipublikasikan kecuali atas persetujuan oleh pasien yang bersangkutan	Terjaminnya kerahasiaan data Riwayat konseling	25 tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			c. Kode Etik Psikologi Indonesia Tahun 2010			
71	BKPSDM Kota Denpasar	Dokumen Proses Pemberhentian ASN	Hanya dapat diungkapkan pada ASN yang bersangkutan dan ASN lainnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Dasar Hukum: a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Berpengaruh kepada proses bisnis / proses pemberhentian	Terjaminnya pelaksanaan pemberhentian PNS	25 tahun
72	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Laporan parpol sebelum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
73	Kesatuan Bangsa dan	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Politik Kota Denpasar				sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembahasan sebelum disampaikan kepada publik	dalam persidangan yang dibuka untuk umum
74	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Data Pribadi Ormas	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Data melindungi data pribadi	Menyesuaikan pedoman jadwal retensi arsip
75	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Konfigurasi database aplikasi username dan password	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan informasi Badan Publik	Terjaganya keamanan informasi Badan Publik	Menyesuaikan pedoman jadwal retensi arsip
76	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Tidak Terbatas
77	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		(Memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)				
78	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	SIMDA Barang	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan	Dapat membahayakan Data Aset Pemerintah berkaitan dengan neraca Pemerintah Kota	Melindungi keamanan data aset pemerintah (Pemeriksaan BPK)	Selama masih digunakan
79	Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
80	Satpol PP Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
81	Satpol PP Kota Denpasar	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
82	Satpol PP Kota Denpasar	Seluruh data, surat-surat, laporan dan dokumen lainnya	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebaran	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan		informasi yang belum akurat	kesalahpahaman informasi	
83	Satpol PP Kota Denpasar	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	a. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan keputusan dan menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
84	Satpol PP Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
85	Satpol PP Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
86	Satpol PP Kota Denpasar	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
87	Satpol PP Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 30	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Melindungi keamanan sistem	Selama masih digunakan/berlaku
88	Satpol PP Kota Denpasar	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	a. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i b. UU No.43 Tahun 2009 pasal 44	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih digunakan/berlaku
89	Satpol PP Kota Denpasar	Rencana MoU (Kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Mengganggu/menghambat proses kesuksesan kerjasama	Mendukung kesuksesan kerjasama	Sampai MoU dilaksanakan
90	Satpol PP Kota Denpasar	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
91	Satpol PP Kota Denpasar	Rencana kerja Anggaran Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
92	Satpol PP Kota Denpasar	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	a. UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
93	Satpol PP Kota Denpasar	Dokumen kontrak barang /jasa beserta lampirannya	a. UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b b. UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 c. Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
94	Satpol PP Kota Denpasar	Data pribadi Pelapor dan Pelanggar Perda dan Perwali	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden
95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Sistem Database Anggota Perpustakaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Identitas Diri Responden Survey	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Arsip Terbatas	a. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar b. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis	Dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Melindungi keamanan data penyelenggara tugas dan fungsi lembaga pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan/ mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan
98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Lokasi Server	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Dapat menimbulkan tindakan criminal (pengrusakan dan pencucian data)	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Internet Protocol / IP Address Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j			
101	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Perempuan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Anak	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
103	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Internet Protocol / IP Address Private	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Selama masih digunakan / berlaku	Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Selama pengungkapannya membahayakan privasi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar		Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j			
104	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Username dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
105	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan Data Pribadi Pegawai	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Data Kesehatan, Data keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c, dan pasal 17.h. Informasi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Keamanan data/informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK	yang berkaitan dengan hak-hak pribadi			
107	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas
108	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas
109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang masih dalam proses dan/ atau belum dikuasai	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		dan/ atau didokumentasikan				
110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Arsip/ dokumen Nota Dinas, memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Tidak Terbatas
111	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Kode Akses Elektronik	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan nasional	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
112	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Data/ dokumen perusahaan secara individual yang mengandung data pribadi/ perusahaan pada Dokumen Perizinan dan Non perizinan	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h. b. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 4 Ayat (2); c. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36;	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan nasional	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
114	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Rencana Awal Investasi Dalam Negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi);	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan nasional	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
115	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Database Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
116	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Pelapor Pro Denpasar	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat menimbulkan konflik antara pelapor dan dilapor	Menjaga rahasia dan keamanan pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
117	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Dokumen detail UKL-UKL-SPPL	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat merugikan pemilik dokumen	Menjaga keamanan rahasia dokumen pemilik dokumen	Sampai pihak yang mempunyai dokumen memberi persetujuan
118	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Data rekam medis pasien	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf H b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Menjamin kerahasiaan privasi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
119	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang mempunyai dokumen memberi persetujuan
120	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Rancangan keputusan pimpinan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, bersifat belum pasti/belum	Melindungi pertahanan dan keamanan negara. Menjaga penyalahgunaan/salah tafsir/perbedaan laporan,	Selama rancangan keputusan tersebut telah ditetapkan dan mengikat

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				mengikat/belum ditetapkan	kegiatan anggaran dan proses bisnis OPD	
121	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Laporan Keuangan yang belum diaudit	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan mengganggu proses bisnis/tusi OPD karena bersifat belum pasti/belum mengikat/belum ditetapkan	Melindungi pertahanan dan keamanan negara, menjaga penyalahgunaan/salah tafsir terkait materi/pokok rancangan keputusan	Selama masih digunakan/berlaku/telat diaudit oleh BPK
122	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Sistem Manajemen Databse	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan database	Menjaga keamanan database	Selama masih digunakan/berlaku
123	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan jaringan	Melindungi keamanan jaringan	Selama masih digunakan/berlaku
124	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	User ID dan Password aplikasi	a. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	Melindungi keamanaan jaringan	Selama masih digunakan/berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	dan Pertanahan Kota Denpasar					
125	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
126	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17; b. UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
127	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Data Pribadi atau data perseorangan meliputi semua elemen Biodata yang ada di Data Base termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Terbuka selama mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;			

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
128	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi terkait Layanan Administrasi Kependudukan				
		a. User ID dan Password Aplikasi SIAK	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 1 Angka 21 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk	Rawan penyalahgunaan kewenangan dalam pemrosesan dan verifikasi ajuan administrasi kependudukan	Melindungi pemilik akun/operator SIAK dari perbuatan yang melanggar aturan dalam pemrosesan dan verifikasi ajuan administrasi kependudukan	Selama hak akses masih berlaku/aktif

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan huruf f, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
		b. User ID dan Password Aplikasi Pendaftaran Daring Dukcapil Kota Denpasar (TARINGDUKCAPIL)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :	Rawan penyalahgunaan pengajuan administrasi kependudukan bukan oleh yang	Melindungi pemilik akun dan keluarga dari penyalahgunaan dokumen administrasi kependudukan yang akan merugikan	Selamanya

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		untuk ajuan online dari masyarakat/ petugas registrasi desa dan kelurahan	Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	bersangkutan karena produk dari ajuan yang berupa TTE dapat secara langsung diunduh melalui akun TARINGDUKCAPIL yang dikirimkan ke email yang didaftarkan		
129	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Register Akta Pencatatan Sipil	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf c; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1;	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Terbuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;			
130	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Berkas permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui online atau offline	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf c; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Terbuka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan, yang bersangkutan
131	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Data Balikan pemanfaatan Data Kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96A;	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta tidak melakukan penyimpangan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain	Terbuka selama mendapatkan izin tertulis dari yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		kerjasama dengan OPD				
132	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Data Center dan Server	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf a dan angka 5 b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25	1. Dapat membahayakan keamanan perangkat serta data 2. Dapat menggunakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 3. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi / mengamankan perangkat serta data 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
133	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
134	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Internet Protocol / IP Address Privat	a. UU no.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
135	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan / berlaku
136	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Identitas Pribadi Perangkat Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas
137	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Data penghasilan pribadi perangkat daerah secara mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas
138	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Gaji, Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi perangkat daerah	Melindungi data pribadi perangkat daerah yang bersifat pribadi	Selama perangkat daerah tersebut masih melakukan tugas
139	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Dokumen rencana pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan dipergunakan dan pengambilan keputusan terkait

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				adanya pengungkapan secara premature		
140	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	SK Pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan
141	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat Menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang /jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Sampai dilakukan pemenang
142	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Peta Lokasi / Penyimpanan Arsip	a. UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I b. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanan	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
143	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Memorandum / Surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	a. UU No.18 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j dan huruf j b. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
144	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
145	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Nota Dinas	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
146	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Semua data dan surat-surat laporan, penelitian dan lainnya yang masih proses atau belum didokumentasikan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
147	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Segala jenis arsip pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
148	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data pribadi, keluarga, rekening pegawai yang menurut peraturan tidak wajib dibuka	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak-hak pribadi	Tidak terbatas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
149	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Lokasi penyimpanan arsip	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan atau membuka arsip yang dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
150	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Lokasi, data, user dan password server	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 c. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) d. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Terkait kebocoran data dan masalah keamanan	Keamanan sistem	Tidak terbatas
151	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data pribadi, keluarga, PMI (Pekerja Migran Indonesia)	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Penyalahgunaan data pribadi	Melindungi keamanan data dan hak-hak pribadi	Tidak terbatas
152	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Data mediasi perselisihan hubungan industrial	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penyalahgunaan data Perusahaan dan Pekerja	Melindungi keamanan data, hak-hak Perusahaan dan Pekerja	Sesuai peraturan yang berlaku
153	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi	Data perusahaan dan pekerja yang menyelesaikan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan	Penyalahgunaan data Perusahaan dan Pekerja	Melindungi keamanan data, hak-hak Perusahaan dan Pekerja	Sesuai peraturan yang berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Kompetensi Kota Denpasar	administrasi hubungan industrial	Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			
154	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data Center dan Server	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 b. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	1. Dapat membahayakan keamanan perangkat serta data 2. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 3. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi hak ases	Selama masih digunakan /berlaku
155	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Source Code Aplikasi/Program	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
156	Dinas Pertanian Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				penyalahgunaan hak akses		
157	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Adress Privat	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
158	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Bandwidth Management	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
159	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Database dan Sistem Manajemen Database	a. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan /berlaku
160	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Identitas Pribasi Perangkat OPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
161	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data Penghasilan Pribadi Perangkat OPD Secara Mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas
162	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama OPD tersebut masih melaksanakan Tugas
163	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Dokumen rencana Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dan pengambilan keputusan terkait
164	Dinas Pertanian Kota Denpasar	SK Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Pelaksanaan Pelantikan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
165	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraaan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai dilakukan pemenang
166	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Peta Lokasi/ Penyimpanan Arsip	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanan	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
167	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Data lokasi (alamat, Banjar, Desa/ Kelurahan) kasus Positif Rabies	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Asas dan Tujuan BAB II Bagian Kesatu, Pasal 2 Ayat 4	Menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat mengetahui 1 lokasi banyak terjadi kasus Positif Rabies dan untuk menjaga image satu lokasi dari Kasus Rabies	Untuk melindungi wilayah yang kasus Positif Rabiesnya cukup tinggi	Tidak terbatas
168	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Data pribadi pegawai yang meliputi: Biodata, Tanda tangan, Penilaian Kinerja	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
169	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi/akses pada seluruh rekening bank milik Dinas Perikanan dan Ketahanan	a. Undang-Undang terbaru tentang Perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dengan menyertakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Pangan Kota Denpasar	tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga			surat persetujuan secara tertulis
170	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Username dan password pengguna aplikasi data-data pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. SK Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Nomor: 100.3.3/34/DPKP/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data, Informasi Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Perikanan dan	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Ketahanan Pangan Kota Denpasar			
171	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Username dan password sebagai PPK Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data atau manipulasi data	Melindungi informasi data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum
172	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	User ID dan Password Aplikasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni, Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual 2. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
173	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Identitas Pribadi Perangkat OPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas
174	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Data Penghasilan Pribadi Perangkat OPD Secara Mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama Perangkat OPD tersebut masih melaksanakan Tugas

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
175	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dokumen Proses Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan gaji, berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data Pribadi Perangkat OPD	Melindungi data Pribadi Perangkat OPD yang bersifat Pribadi	Selama OPD tersebut masih melalcsanakan Tugas
176	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Dokumen rencana Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selaina masih berlaku dan diperlukan dan pengambilan keputusan terkait.
177	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	SK Pengangkatan dan Pemberhentian OPD dalam dan dari Jabatan stuktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Pelaksanaan Pelantikan.
178	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai dilakukan pemenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				di bidang pengadaan barang/jasa		
179	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi pegawai	UU KIP dan UU ASN	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/ hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
180	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi Pelaku Usaha	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
181	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Data pribadi Pemilik Industri	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rahasia pribadi individu	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
182	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Memuat nama importir sehingga bisa dimanfaatkan eksportir lainnya untuk merebut pembeli (buyer) 2. Memuat harga barang yang bisa dimanfaatkan pedagang lain yang	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				sejenis dalam menentukan harga		
183	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai a. Kode Etik b. Pelanggaran Disiplin c. Informasi Pribadi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
184	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Laporan Keuangan yang Belum di audited	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan laporan keuangan sebelum keluar hasil audit oleh pihak yang berwenang	Selama belum di audit
185	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
186	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan	Kode akses (username dan password) Aplikasi,	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Menengah Kota Denpasar	termasuk password website dan password email				
187	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Aset dan Neraca Koperasi	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Membuka rahasia Aset dan Neraca Koperasi membahayakan keamanan keuangan koperasi.	Melindungi Data Aset dan Neraca Koperasi	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Koperasi
188	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Hasil pengawasan Koperasi a. Pokok-Pokok b. Temuan Rekomendasi tidak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 3 b. Permenkop UKM RI No. 9 Tahun 2020	Dapat menimbulkan keresahan anggota Menurunnya kepercayaan anggota terhadap Koperasi	Menjaga kepercayaan anggota koperasi	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Koperasi
189	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Data Tenant Inbis terkait: a. Data pribadi (no ktp, no. Hp pribadi, alamat rumah, npwp) b. Data Usaha (omzet usaha)	PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga privasi data	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan
190	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan	Data UMKM Binaan Terkait Data Pribadi	a. PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Menjaga Kepercayaan UMKM Binaan Untuk Memberikan Data Pada Pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Menengah Kota Denpasar		dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. UU No. 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Mengatur Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)			keamanan pelaku UMKM binaan
191	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Maraknya kasus kekerasan anak (kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan) viral di media sosial	Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak baik bagi korban dan pelaku seperti terganngunya kesehatan mental, perkembangan sosial, dan pendidikan. Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial juga dapat berkontribusi pada meningkatnya angka	Penangan kasus dilakukan oleh Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan Satuan Pendidikan dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kota Denpasar	(-)

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
				kejahatan di masyarakat.		
192	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Data pribadi Pegawai, Guru dan Murid di Dinas Dikpora Kota Denpasar yang bersifat spesifik (NISN, NIK, No Telephone, data biometri, data genetika, Riwayat Kesehatan, Data Keuangan pribadi, Aset, Pendapatan, Rekening, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan , data anak dan/ data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menurut situs resmi BPK RI)	UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Jika Data pribadi seseorang dibuka untuk umum maka konsekuensinya dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kejahatan, termasuk penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan untuk pinjaman online. Pelaku dapat menggunakan informasi seperti KTP, nomor telepon, dan data perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan korban, seperti mengajukan pinjaman fiktif, membuka rekening bank baru, atau melakukan transaksi tanpa izin.	Keamanan data pribadi tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	Selalu berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
193	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Data Cuti Sakit Pegawai, Guru dan Muris di Dinas Dikpora Kota Denpasar	UU Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009): Pasal 57 mengatur tentang hak pasien atas kerahasiaan medis, termasuk data terkait cuti sakit.	Penyebaran data cuti sakit dapat membuat mereka merasa tidak nyaman, malu, atau bahkan terintimidasi.	Keamanan data cuti sakit tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	Selalu berlaku
194	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Riwayat, kondisi, & perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pegawai, guru, dan murid di Dinas Dikpora Kota Denpasar	UU No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Pasal 17 huruf h butir 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Keamanan data tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal	Selalu berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
					seperti pencurian identitas.	
195	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Data kasus kekerasan anak (kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan)	Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak baik bagi korban dan pelaku seperti terganggunya kesehatan mental, perkembangan sosial, dan pendidikan. Kasus kekerasan anak yang viral di media sosial juga dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat.	Penangan kasus dilakukan oleh Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan Satuan Pendidikan dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kota Denpasar	Selalu berlaku
196	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Bukti Penanganan Kasus Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Keamanan data tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran	Selalu berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
					atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Identitas Penerima Beasiswa Kurang Mampu	UU No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Pasal 17 huruf h butir 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Keamanan data tidak hanya penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang bisa muncul akibat kebocoran atau kehilangan data. Sebuah kebocoran data bisa mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga tindakan kriminal seperti pencurian identitas.	Selalu berlaku
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Kode akses (username dan password) Aplikasi, Internet/WiFi. Termasuk password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode Masih Digunakan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		website dan password email				
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi pegawai 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Pelapor Pro Denpasar	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan konflik antara pelapor dan dilapor	Menjaga rahasia dan keamanan pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
201	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat dan kondisi rahasia pribadi dan keluarga pegawai ASN				
		a. Biodata pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		b. Dokumen/berkas kepegawaian PNS	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan 2. Menjaga privasi	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
						2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		c. Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		d. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		e. Data pribadi Pegawai kontrak/Non-PNS	UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS 2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
202	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		a. Data rekam medis	a. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan."	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	a. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		c. Hasil ujian kompetensi tenaga kerja Non-PNS	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
203	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi				

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose	Sampai audit selesai
		b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS	a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 c. UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	Selama rekening masih digunakan
204	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang				
		a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama 3 periode penilaian

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK
		c. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
205	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Prov. DIY	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Hingga proses surat tersebut selesai
206	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang dan jasa
207	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	a. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas Penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			b. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa			
208	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kode akses (username dan password) Aplikasi Intrernet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
209	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Kronologi dan proses mediasi	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2008 pasal 1 ayat 12	Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak
210	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Dokumen persidangan ajudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan	Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner
211	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Rekaman elektronik persidangan ajudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan	Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner Dapat diberikan dalam bentuk

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
						cetak dengan penghitaman/ pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan
212	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil Uji Kompetensi (tes tertulis dan psikotest) Seleksi Calon Anggota KPID	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
213	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil penilaian Dewan Juri Anugerah Penyiaran	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
214	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Hasil penilaian dan evaluasi Forum Rapat Bersama (FRB) dalam rangka permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi/rahasia bisnis lembaga penyiaran	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pemohon IPP
215	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
216	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Riwayat dan kondisi rahasia pribadi penyewa Gedung	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 tahun	Mengungkap data pribadi wajib retribusi	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Dharma Negara Alaya	2016 tentang Perubahan UU ITE	Gedung DNA yang bersifat rahasia	data/informasi yang bersangkutan	
217	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Pemberian Keringan kepada Wajib Retribusi Gedung Dharma Negara Alaya	Peraturam Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023	Mengungkap data pribadi wajib retribusi Gedung DNA yang mendapatkan keringanan biaya	1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
218	Dinas Sosial Kota Denpasar (Bidang Penanganan Fakir Miskin)	Data By Name By Address (BNBA) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
		Data by Name By Address PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c.UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	penyalahgunaan data pribadi	informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	
		Data by Name by Address DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
219	Dinas Sosial Kota Denpasar	Data by Name by Address PSKS (Potensi dan Sumber	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik.	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	(Bidang Pemberdayaan Sosial)	Kesejahteraan Sosial)	b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
220	Dinas Sosial Kota Denpasar (Sekretariat)	Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU No. 27 Tahun 2022 adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	1. Berpotensi melanggar UU 14/2008 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). 2. Risiko penyalahgunaan data pribadi	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
		Informasi pada Dokumen	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1.Berpotensi melanggar UU	1. Sesuai Hukum, Tidak melanggar ketentuan	Sesuai waktu yang dibutuhkan dengan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 b. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik c. UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).	14/2008 2. Timbulnya kesalahpahaman publik terhadap program yang belum final, intervensi pihak luar, instabilitas pelaksanaan kebijakan.	keterbukaan informasi publik. 2. Perlu diuji secara berkala: Bila klasifikasi informasi berubah maka wajib diperbarui statusnya. 3. Meningkatkan akuntabilitas: Dengan menunjukkan bahwa penutupan informasi dilakukan berdasarkan uji konsekuensi	catatan bisa berubah jika : Persetujuan tertulis dari pihak terkait,
221	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Perempuan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang
222	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Database kasus kekerasan seksual pada Anak	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 5 b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan keselamatan individu	Melindungi keamanan data pribadi/individu	Selama pengungkapannya membahayakan privasi seseorang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
223	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
224	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Sistem Managemen Database: Informasi atau dokumen terkait hak akses aplikasi dan server	Pasal 17 huruf c angka 6 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut	Dapat mengungkap data rahasia pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
		Bandwidth Management termasuk informasi dan lokasi NOC dan konfigurasi jaringan	Pasal 17 huruf b dan j UU No 14 Th 2008 UU 11 tahun 2008	Dapat menyebabkan serangan terhadap pengelolaan jaringan	Menjaga pengelolaan jaringan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan
225	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data pribadi kepegawaian (termasuk daftar keluarga, cuti sakit, gaji dan pendapatan termasuk aset dan rekening bank, data pendidikan formal	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: keuangan, aset,	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		dan informal, serta hasil penilaian kompetensi pegawai	pendapatan, dan rekening bank seseorang			
226	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan ataupun pelaksanaan Kegiatan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
227	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada (SP4N Lapor, PRO Denpasar dan PPID) dan Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
228	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Berita sandi, Spesifikasi sarana komunikasi sandi, Perangkat khusus persandian dan Kunci sistem sandi serta peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
229	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	Data pribadi responden survei/penelitian	UU No. 14 Th 2008 huruf j dan ketentuan lainnya dalam UU Perlindungan Data Pribadi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
230	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen cuti sakit pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen pribadi pegawai yang terkait dengan keuangan, aset, pendapatan,	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		dan rekening bank seseorang	dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	rekening bank seseorang		
		Informasi atau dokumen terkait hasil penilaian kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu hasil-hasil evaluasi apabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi atau dokumen terkait pendidikan formal atau pendidikan non formal pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Informasi pada Dokumen Rancangan Kegiatan Anggaran yang belum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat menghambat proses penyusunan ataupun pelaksanaan Kegiatan yang masih dalam proses pembahasan	Dapat memperlancar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengesahan dokumen
231	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Akun Sosial Media joyfull.denpasar	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
		Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	a. Pasal 17 huruf h UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
232	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	Data Pribadi responden survei SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	UU No. 14 Th 2008 huruf j dan ketentuan lainya dalam UU Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
233	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 c. UU No 24 Th 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
234	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Akses (username dan password) Aplikasi G-Sinjab	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
235	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Data pribadi kepegawaian	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
236	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	Biodata Pegawai (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang,Riwayat Keluarga dan	Pasal 17 UU huruf h angka 3 No 14 Tahun 2008 informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia yaitu keuangan, aset,	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan data	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		Dokumen pribadi lainnya)	pendapatan dan rekening bank seseorang			
237	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	Daftar akun, password dan data inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (memuat email , LHKPN, pajak,sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu keuangan , aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Dapat mengungkap Daftar akun, password dan data inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (memuat email, LHKPN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lainnya)	Menjaga rahasia daftar akun dan data inputan yang digunakan ASN	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
238	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Kode Akses (username daan password) Aplikasi, Internet/WIFI, termasuk password website dan password email	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku
239	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	SPJ, SPM, SPP, SP2D	a. UU No. 8/1974 tentang Keuangan Negara b. UU 2004 Tentang Perbendaharan negara	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga Kerahasiaan Pembelanjaan	Masa pelaksanaan pekerjaan
240	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Data Pribadi Kepegawaian	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Password/kode berlaku

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Setda Kota Denpasar					
241	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	LHP Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersifat rahasia	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, Penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Keterlambatan dalam penanganan masalah	Melindungi kepentingan Negara, menjagakerahasiaan proses penegakan hukum, melindungi hak-hak individux	(-)
242	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	Informasi atau dokumen Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, Rencana Kerja, MoU/MSP dan Rencana Kerja Tahunan.	a. Pasal 17 huruf f angka 2 UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri yaitu korespodensi diplomatik antarnegara b. Pasal 17 huruf b UU No 14 Th 2008 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Dapat mengungkap judul kerja sama dan mitra yang diajak bekerja sama	Menjaga rahasia terkait ruang lingkup, hak dan kewajiban serta tugas tanggung jawab para pihak	Selama jangka waktu yang dibutuhkan serta didasarkan atas kesepakatan para pihak

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat			
243	Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar	Kajian/Telaahan Staf	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Pengambilan keputusan/kebijakan menjadi lebih kondusif dan terarah	Ketika kebijakan sudah ditetapkan
244	Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar	Laporan Hasil Rapat Penanganan Permasalahan Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Pengambilan keputusan/kebijakan menjadi lebih kondusif dan terarah	Apabila dijadikan alat bukti dipersidangan
245	Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar	Data Informasi dan atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan permasalahan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	Rahasia pribadi seseorang khususnya hak milik seseorang dapat terjaga kerahasiannya	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan, untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
246	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Telaahan staf yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf a	Menghambat proses pengambilan keputusan, mengganggu stabilitas publik, serta melanggar prinsip rahasia jabatan	Menjamin keputusan yang diterima publik adalah hasil akhir yang sah dan valid	Sampai keputusan ditetapkan
247	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	Draft keputusan kepala daerah atau SK target Capaian Standar Pelayanan Minimal sebelum ditandatangani	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat huruf a	Menghambat proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung	Mendukung proses penyusunan kebijakan yang independen, profesional, dan tidak terganggu opini publik sebelum waktunya	Sampai ditandatangani dan disahkan
248	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pada saat proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (3)	1. Berpotensi digunakan oleh peserta untuk menyusun penawaran mendekati HPS. 2. Mengganggu persaingan sehat. 3. Menyebabkan penggelembungan (mark-up) harga dan potensi kerugian negara.	1. Menjaga objektivitas dan integritas proses penawaran. 2. Mencegah kolusi atau kesepakatan harga tidak wajar antar peserta. 3. Menjamin tercapainya efisiensi belanja negara.	Sampai dengan waktu pengumuman pemenang pemilihan penyedia
249	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Proses evaluasi Dokumen	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b.	1. Dapat mengundang intervensi pihak eksternal.	1. Memberi ruang objektif bagi Pokja Pemilihan dalam bekerja.	Sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Setda Kota Denpasar	Penawaran oleh Pokja Pemilihan.	b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b	2. Membuka potensi lobi atau tekanan kepada Pokja Pemilihan. 3. Mengganggu independensi dan netralitas penilaian oleh Pokja Pemilihan.	2. Menjaga integritas dan kerahasiaan proses evaluasi sampai pengumuman resmi. 3. Menghindari konflik kepentingan.	
250	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan oleh Pokja Pemilihan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b	1. Menimbulkan spekulasi, ketidakpercayaan, atau protes dini dari peserta. 2. Memunculkan upaya mempengaruhi hasil pemilihan. 3. Mengganggu tatanan prosedural.	1. Menjamin proses pemilihan berjalan tertib. 2. Menghindari pengaruh eksternal hingga keputusan resmi ditetapkan. 3. Menjaga kerahasiaan strategi evaluasi.	Sampai dengan diumumkannya pemenang secara resmi.
251	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b.	1. Informasi dalam BAHP sebelum pengumuman	1. Memberikan kepastian hukum bahwa informasi pemenang dalam BAHP	Sampai dengan pengumuman pemenang secara resmi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	Setda Kota Denpasar	Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.	b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b	pemenang bersifat belum final, bisa berubah. 2. Membingungkan publik jika terjadi perubahan pemenang sebelum diumumkan resmi. 3. Meningkatkan potensi sengketa.	diumumkan hanya setelah sah dan final. 2. Menjaga kepercayaan terhadap prosedur resmi. 3. Menghindari gangguan terhadap hasil yang belum ditetapkan.	
252	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Silsilah Waris	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi	Satu Tahun
253	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	Data Kependudukan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat (1) huruf b	Mengungkap Data Pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi	Satu Tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
254	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data keuangan dan data Pribadi Pegawai	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf H b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
255	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Penerima Layanan	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
256	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Pengadu Pada Pengaduan Masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
257	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Kepala Dusun/Kepala Lingkungan	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
258	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Lurah dan Perbekel	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
260	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Bendesa Adat	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf H b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
261	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Data Pribadi Pengurus Organisasi Tingkat Kecamatan	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf H b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila: Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
262	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen Transaksi kas di rekening kas daerah	a. UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publikk mencapai kkeberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
263	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 17 . b. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publikk mencapai kkeberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
264	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara	UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publikk mencapai kkeberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
265	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	Dokumen Pendukung Laporan Keuangan (SPJ Fungsional)	UU No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publikk mencapai kkeberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: Terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang
266	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Arsip Berkas Surat Pernyataan Silsilah dan Surat Pernyataan Waris beserta bukti dukungnya	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2: Badan Publik dikkecualikan memberikan informasi publik yang apabila dibuka dan berikan kepada pemohon informasi publikk dapat: 1. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat seseorang	1. Tidak memberi manfaat langsung bagi publik secara luas karena informasi ini bersifat individual dan spesifik 2. Tidak relevan secara langsung dengan fungsi transparansi publik 3. Berpotensi melanggar UU KIP dan UU PDP kkarena	1. Privasi dan hak atas data pribadi pihak terkait tetap dilindungi 2. Mengurangi resiko penyalahgunaan informasi pribadi atau hukum 3. Tidak mengganggu kepentingan publik karena menyangkut kepentingan privat	10 Tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			2. Mengungkap rahasia pribadi seseorang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 2 ayat (1): Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan pemrosesan data pribadi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. Pasal 58 huruf a: Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengakses data pribadi milik orang lain.	membocorkan data pribadi yang dilindungi		
267	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Dokumen Pertahanan 1. Akte Jual Beli 2. Buku B Rincikan 3. Letter C 4. Warkah Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h: Badan publik dapat tidak memberikan informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, termasuk di dalamnya informasi tentang: a. Lokasi, jumlah, jenis dan nilai kekayaan alam b. dokumen yang berpotensi disalahgunakan	1. Mengungkap Data Pribadi Kepemilikan tanah yang bersikap rahasia 2. Mengindikasi spekulen dan mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan	1. Melindungi kerahasiaan dokumen pemilik tanah 2. Menjaga kerahasiaan tanah 3. Mencegah spekulen dan mafia tanah	Permanen

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			untuk mengklaim hak atas tanah atau sumber daya alam Huruf g: Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat probadi dan penyangkut hak privat seseorang (seperti akte jual beli tanah), dikecualikan. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 19: Badan publik wajib melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ingin dikecualikan. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN Pasal 12 ayat (4) huruf i: Buku tanah, surat ukur, warkah, dan dokumen pertanahan dikategorikan			

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			sebagai informasi yang dikecualikan. Pasal 13: Dokumen tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahan (jika dibutuhkan pelaksanaan tugas) atau berdasarkan kasus khusus			
268	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
269	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Informasi terkait akses masuk ke sebuah aplikasi	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	Dapat mengungkap rahasia data pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			data yang dikelola pada aplikasi tersebut			
270	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Aplikasi Pengaduan (SP4N Lapo! Dan Pro Denpasar)	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	"Menjaga rahasia pribadi seseorang "	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
271	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Arsip Berkas Surat Pernyataan Silsilah dan Surat Pernyataan Waris beserta bukti dukungunya	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2: Badan publik dikecualikan memberikan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat: 1. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 2. Mengungkap rahasia pribadi seseorang	1. Tidak memberi manfaat langsung bagi publik secara luas karena informasi ini bersifat individual dan spesifik 2. Tidak relevan secara langsung dengan fungsi transparansi publik 3. Berpotensi melanggar UU KIP dan UU PDP karena membocorkan data pribadi yang dilindungi	1. Privasi dan hak atas data pribadi pihak terkait tetap terlindungi 2. Mengurangi resiko penyalahgunaan informasi pribadi atau hukum 3. Tidak mengganggu kepentingan publik karena menyangkut kepentingan privat	10 Tahun

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 2 ayat (1): Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan pemrosesan data pribadi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. Pasal 58 huruf a: Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengakses data pribadi milik orang lain.			
272	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Dokumen Pertanahan 1. Akte Jual Beli Tanah 2. Buku B Rincikan 3. Leter C 4. Warkah Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h: Badan publik dapat tidak memberikan informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, termasuk di dalamnya informasi tentang: a. Lokasi, jumlah, jenis dan nilai kekayaan alam b. dokumen yang berpotensi disalahgunakan untuk mengklaim hak atas tanah	1. Mengungkap Data Pribadi Kepemilikan tanah yang bersikap rahasia 2. Mengindikasi spekulen dan mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan	1. Melindungi kerahasiaan dokumen pemilik tanah 2. Menjaga kerahasiaan tanah 3. Mencegah spekulen dan mafia tanah	Permanen

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			atau sumber daya alam Huruf g: Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat probadi dan penyangkut hak privat seseorang (seperti akte jual beli tanah), dikecualikan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 19: Badan publik wajib melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ingin dikecualikan. Peraturan Mentri ATR/BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN Pasal 12 ayat (4) huruf i: Buku tanah, surat ukur, warkah, dan dokumen pertanahan dikategorikan sebagai informasi yang			

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			dikecualikan. Pasal 13: Dokumen tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahan (jika dibutuhkan pelaksanaan tugas) atau berdasarkan kasus khusus			
273	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) pegawai	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
		Informasi terkait akses masuk ke sebuah aplikasi	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data yang dikelola pada aplikasi tersebut	Dapat mengungkap rahasia data pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

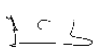
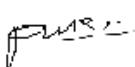
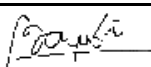
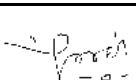
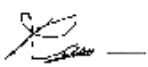
No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
274	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	Data Pribadi Pelapor pada Aplikasi Pengaduan (SP4N Lapor! Dan Pro Denpasar)	a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
275	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	sistem informasi manajemen administrasi kepegawaian (Aplikasi Simak di Hati)	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu Data Pribadi Pegawai	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu Data Pribadi Pegawai	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi pegawai
276	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data Rekam Medis Pasien	a. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Permenkes Nommor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis c. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau atas kepentingan hukum oleh pihak yang berwenang
277	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pribadi pegawai	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau atas kepentingan hukum oleh pihak yang berwenang

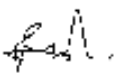
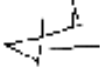
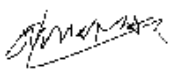
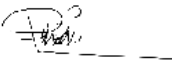
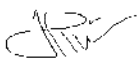
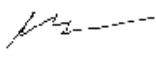
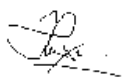
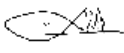
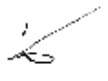
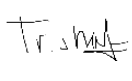
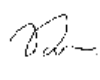
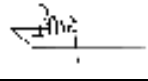
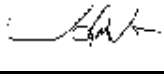
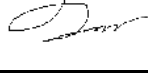
No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
278	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pengadaan barang dan jasa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen penawaran kontrak saat proses berlangsung apabila diungkap dapat mengganggu keamanan proses pengadaan	Menjaga keamanan, objektivitas, dan efisiensi proses pengadaan serta pengelolaan aset	Selama proses pengadaan barang jasa
279	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data pengelolaan data elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/IT	Lokasi server, database, manajemen sistem, mekanisme keamanan data, dan teknologi informasi apabila diungkap dapat mengganggu keamanan proses pengadaan	Menjaga keamanan perangkat dan data	Tidak Terbatas
280	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data dokumen keuangan	Permenkes No. 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Laporan keuangan yang belum diaudit, dokumen SPJ dan SP2D, SPM, SPP sebelum diaudit, apabila diungkap merugikan karena diungkap secara prematur	Mencegah mispersepsi dan misinterpretasi oleh karena pengungkapan secara prematur	Tidak Terbatas

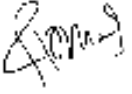
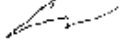
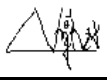
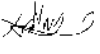
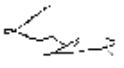
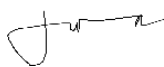
No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
281	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Data hutang pasien	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Identitas dan detail hutang pasien kepada rumah sakit apabila diungkap akan mengganggu pasien dan dapat terjadi penyalahgunaan data pasien	Menjaga privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan data pasien yang merugikan pasien dan rumah sakit	Tidak Terbatas
282	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Naskah kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	Muncul persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha/kepentingan yang tidak sehat	Tidak Terbatas
283	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Detail Keuangan Sebelum Audit	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik Pasal 17 b. UU No. 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 14 dan Pasal 15	Apabila dibuka terjadi informasi data yang belum akurat / belum diperiksa.	Apabila ditutup membantu Perumda memberikan informasi yang akurat dan benar	Dibuka apabila setelah diperiksa oleh autor
284	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Gaji / Penghasilan pegawai tanpa persetujuan yang bersangkutan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. PP No. 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Apabila ditutup membantu Perumda memberikan informasi yang akurat dan benar	Dibuka apabila setelah mendapat ijin oleh yang bersangkutan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 14 dan Pasal 15.			
285	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Keuangan	Perda No 13 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma		v	Tak Terbatas
286	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Laporan Keuangan Yang Belum di Audit	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini	Dapat membahayakan perusahaan	Melindungi pertahanan, dan keamanan perusahaan
287	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai (Karyawan-Karyawati) dan Juga Data Pribadi Petugas Jasa Layanan parkir	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini	Dapat mengancam privasi karyawan	Melindungi privasi karyawan
288	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	Sandi /User Name - Program Siparkit (Sistem Parkir Berbasis IT dan Keuangan Terintegrasi)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Sampai ada ketentuan/aturan baru yang membatalkan ketentuan yang berlaku saat ini	Dapat membahayakan perusahaan	Melindungi pertahanan, dan keamanan perusahaan

Bahwa Hari Rabu, 23 Juli 2025 telah terlaksana Pengujian Konsekuensi atau Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja	No. HP	TTD
1	Dimas Fadhilah Aprilian Santosa	Koordinator Wilayah Bali	Mafindo	082337799245	
2	KADEK ASWARI	Analisis Permasalahan Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	081338739888	
3	Wayan suyadnya	Komisioner kpid bali	Pengawasan isi siaran	+628175766954	
4	Ni Nyoman Sukerti, SE	Pelaksana	BPKAD	+6282341135131	
5	Luh Komang Putri Pramesti	Penata Layanan Operasional	Inspektorat Daerah Kota Denpasar	085162567168	
6	DEWA GEDE ADNYANA SUTHA WIDJA	ANALIS SDM APARATUR	INSPEKTORAT	081353333683	
7	NI MADE INDAH MELIAWATI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BPKAD KOTA DENPASAR	+6287701955406	
8	I Gede Bagus Bayu Kresnapati	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	+6287838877532	
9	Bdn. Anak Agung Ayu Dewi Purnami, SST	Ka Unit Humas dan Promosi	RSUD Wangaya Kota Denpasar	+6281916674265	
10	Ida Ayu Dewi Citrawati	Sekretaris	Dinas Pariwisata	081239888777	
11	MADE RAI EDI MULYAWAN, SSTP., M.E	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PATDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR	+628113884441	
12	I Wayan Teguh Wijaya, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	081999381436	
13	Putu Aditya Gunawan, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	+6285934454767	
14	Made Dedi Pradipta	Pengadministrasi Perkantoran/ Admin PPID	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	087855647988	
15	I Gusti Ayu Istri Raka, SH	Analisis Materi Sidang	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	+6289697175973	
16	Anak Agung Ketut Putriasri	Sekretaris	Dinas Pertanian Kota Denpasar	081237673421	
17	Ni Made Suryani, S.E.,M.A.P.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Kantor Camat Denpasar Utara	081239463434	
18	Luh Rani Wijayanti, S.I.Kom	Analisis Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Denpasar Selatan	081339279225	
19	Ni Nyoman Trisna Dewi,SE	Plt. Sekretaris Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	081237578568	
20	A.A. GEDE DALEM EKAWIJAYA	KASUBAG. HUMAS	PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA	081246212164	

21	Luh Putu Ratna Iswari	Kepala Bagian Umum	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	081236977775	
22	I Gusti Ngurah Agung Satriya Brahmanda, SE	Penata Layanan Operasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	+628147185466	
23	Desak Made Ekaprastyawati	Kasubag Pelaporan Dan Pengaduan	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	085737028585	
24	I Wayan Sumanata	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar	081805354770	
25	A.A. Istri Pramitha Swari,S.Kom	Penata Layanan Operasional	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	082236823297	
26	I Wayan Ardana	Kabid PPI	BKPSDM	08553772002	
27	Made Yudyani Putri	PPID	Dinas Sosial Kota Denpasar	+6285920792091	
28	IDA AYU MIRAH ULANTARI, S.SOS	KEPALA SUB BIDANG SISTEM DAN PELAYANAN INFORMASI	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR	081237203322	
29	Gusti Ayu Made Suryani	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	081337303879	
30	Ira Mustika Wiranti	Perencana Ahli Pertama	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	0895366639291	
31	I MADE GIRIASA, SH., MH	ANALIS PAJAK DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR	081805427045	
32	A.A. Trisha Dewi Parasthiwi, S.E	Perencana Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	+6282236825206	
33	Dewi Pitriyanti, S.I.P	Analisis Desa dan Kelurahan	Kecamatan Densel	08988740370	
34	Nyoman Indira Wulandari	Administrator Kesehatan	Dinas Kesehatan	082340008506	
35	Ni Nyoman Ayu Permayasari	Pengadministrasi Hukum	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	+6281216453547	
36	Putu Tony Marthana Wijaya	Kabid Penataan Ruang	DPUPR Kota Denpasar	+628123916021	
37	Ni Nyoman Dian Sudewi	Perencana Ahli Pertama	DLHK Kota Denpasar	081239984471	
38	Ida Ayu Widya Kumalasari	Pelaksana	BPKAD Kota Denpasar	08787839266	
	LUH KADE MARIANI,SH	PELAKSANA	DINAS KOPERASI UMKM KOTA DENPASAR	085737945466	
40	drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, MSi	Plt. Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	087861785354	
41	NI PUTU ANINDITA ADI PURWANI, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR	085338098888	
42	I PUTU DIDI MAHENDRA PUTRA, S.Kom.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA DENPASAR	081999000912	

43	Gede Krisna Udiana, S.KM.,M.H.Kes.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	RSUD Wangaya	+628123898787	
44	PUTU LISYA EKA MARYANTI,S.SOS	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	DISPERINDAG KOTA DENPASAR	082247419131	
45	NI KOMANG INTAN CAHAYANI,SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLIMUDA	BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT SETDA KOTA DENPASAR	081260201827	
46	Ni Nyoman Sriwirani Widowati	Sekretaris	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	083114610735	
47	I Made Nanda Agustika	Staf Teknis	BPKAD	085738646539	
48	Ni Putu Desy Purnama	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	081337488346	
49	PUTU PRADNYA PRATISTHA KARYA, S.KOM.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	081936076769	
50	I GEDE SATYA ADHI WICAKSANA	Penata Layanan Operasional	Dinas Sosial Kota Denpasar	081236667066	
51	NI IUH LELY SRIADI	SEKRETARIS	DISDUKCAPIL KOTA DENPASAR	087860127172	
52	Komang agus widia wedan putra	Penata layanan operasional	Bagian organisasi setda kota denpasar	+6281229909557	
53	NI PUTU ANINDITA ADI PURWANI, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR	085338098888	
54	Ratna iswari	Kepala bagian umum	Perumda pasar sewakadarma	081236977775	
55	Ni Kadek Ariani, SS	Analisis Tata Usaha	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota	081999884653	
56	Ni Made Ayu Krisna Dewi, S. Kom.	Analisis Data dan Informasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	082144464540	
57	Kadek Ayu Pradnya Sari	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Kota Denpasar	087888777649	
58	Nyoman Piny Suryani	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Denpasar Timur	085237818334	
59	Dewa Putu Satrya Yudants	Staf	Kecamatan Denpasar Timur	089686324206	
60	I Nyoman Wira Sanjaya	Staf Pengadministrasian Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	082234640040	
61	I Wayan Adi Aryanta	Komisioner KI Bali	Bidang Sengketa	081933028839	
62	NI PUTU DYAH NOVI LESTARI	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	089531522926	
63	Ni kadek yuli lestari	Staff	Kesbangpol dps	082260886979	
64	I Gede Wahyu Agustiana Putra, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	081228770140	

65	Ni Wayan Vijayanthi Sari	Sekretaris	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0815581264034	
66	Jauzaa Maylia Suhendro	Anggota	Relawan TIK Provinsi Bali	081237874256	
67	I Gede Putu Krisna Juliharta	Ketua	Relawan TIK	081999551122	
68	I Gusti Ayu Ngurah Raini	Staf Ahli Walikota bid. Pembangunan dan Perekonomian	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	87860084883	
69	Ni Putu Ari Widiastuti	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	+6287853554994	

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kota Denpasar,

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197801281996121003